

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian peneliti harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, dalam membahas masalah Analisis Ekonomi Sektor Basis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2019 ada beberapa teori yang relevan terhadap pembahasan penelitian tersebut.

2.1.1. Ilmu Ekonomi

Adam Smith (Dalam Subhan,2018) mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. J.L Mey JR (Dalam Subhan,2018) mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke Arah kemakmuran. Kesimpulan dari dua konsep tersebut bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia, baik yang dilakukan secara individu maupun bersama dalam masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran, kemakmuran merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh pelaku ekonomi karena semua kebutuhan maupun keinginan secara ekonomi dapat dipenuhi dengan baik dan mudah. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang memegang peranan penting dalam kehidupan

sosial manusia karena sebagian besar perbuatan manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.1.2. Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain (Ridwan,2016). Manfaat ilmu ekonomi regional ini dari sudut potensi yaitu masing-masing wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda. Dengan adanya ilmu ekonomi regional ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan ekonomi tingkat regional atau wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi di tingkat nasional.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya serta peran sektor swasta pun petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-organisasi sosial. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economy entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang terkait satu sama lain (Arsyad,1999:128).

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994). Tolak ukur kemakmuran suatu negara atau daerah tertentu dilihat

dari pertumbuhan ekonominya khususnya negara berkembang seperti Indonesia. maka dari itu pertumbuhan ekonomi salah satu sektor penting dalam suatu negara atau daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat di definisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi pun dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selain pertumbuhan ekonomi secara nasional terdapat pula pertumbuhan ekonomi secara regional atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang ada di wilayah atau daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah ini harus bersumber dari proses pembangunan ekonomi di daerah itu sendiri. Karena jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak murni hasil dari usaha pengembangan ekonominya sendiri atau terdapat suntikan dana atau bantuan dari pemerintah pusat maka pertumbuhan ekonomi tersebut biasanya tidak bertahan lama atau sementara, karena apabila pemerintah pusat memberhentikan bantuan tersebut maka pertumbuhan ekonomi daerah pun akan melambat atau terhenti.

2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776). Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith system ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi yang *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*Stationary state*). Posisi stationer terjadi apabila sumber daya alam yang ada telah sepenuhnya dimanfaatkan. Kalaupun ada pengangguran itu hanya bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.

2. Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka memakai perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- a. Perekonomian bersifat tertutup
- b. Hasrat menabung ($MPS=s$) adalah konstan

- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*),serta
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang baik (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut

$$g = k = n$$

Dimana:

$g = growth$ (Tingkat pertumbuhan output)

$k = Capital$ (Tingkat pertumbuhan modal)

$n =$ Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pemerintah. Tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah harus merencanakan besar investasi agar terjadi keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran.

3. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M.Solow (1970) dan T.W Swan. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi. Perbedaan dengan teori atau model Harrod-Domar adalah dimasukkannya kemajuan teknologi dalam model ini. Selain itu, Solow-Swan

menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L).

Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan ini melihat banyak hal dalam mekanisme pasar yang dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

4. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan

Teori pertumbuhan jalur cepat (*Turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena apotensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang lebih singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar daerah maupun luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Mensinergikan sektor-sektor membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Misalnya, usaha perkebunan dengan usaha peternakan.

Rumput atau limbah dari perkebunan bisa dijadikan pakan dan kotoran dari peternakan bisa dijadikan pupuk. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor lain. Menggabungkan kebijakan jalur cepat (*turnpike*) dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan membuat perekonomian tumbuh dengan cepat.

2.1.4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Michael Todaro dalam suryana,2010).

Pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Yang didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara (dalam buku W.W Rostow berjudul *The Stage Of Economic*,1960).

2.1.4.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan otonomi daerah diserahkan pada pemerintah daerah atau kabupaten/kota, maka dari itu pemerintah kabupaten atau kota diharapkan mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar mampu meningkatkan kemampuan dalam mencari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya sehingga penerapan kebijakan pembangunan di setiap daerah pun pasti berbeda.

Kunci keberhasilan desentralisasi melalui otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Munir,2002). Apabila pelaksanaan pembangunan daerah tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal dan akan mengakibatkan pembangunan ekonomi terhambat dan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Maka perlu adanya rencana strategi yang baik agar pembangunan daerah dapat tepat atau sesuai potensi dari wilayah atau daerah itu sendiri.

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Setiap negara memiliki pendapatannya sendiri yang berasal dari proses transaksi yang dilakukan hal tersebut bisa disebut sebagai indikator ekonomi. Indikator ekonomi tersebut bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkatan dari nasional hingga daerah. Pada tingkat

nasional indikatornya disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara untuk tingkat daerah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. Nilai dari PDRB ini dapat mempresentasikan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Menurut (Tarigan,2012) metode perhitungan pendapatan regional dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, dan luas area.

Metode langsung dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan produksi yaitu penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara

mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik atau barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri.

2. Pendekatan pengeluaran yaitu menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan barang dan jasa yang di produksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan barang dan jasa digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.
3. Pendekatan pendapatan, yaitu metode yang dilakukan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, seperti upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Metode pendekatan pendapatan ini banyak dipakai pada sektor jasa.

Sedangkan metode tidak langsung adalah salah satu cara mengalokasikan produk regional bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing masing bagian wilayah. Misalnya Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat digunakan antara lain nilai produksi bruto atau neto setiap sektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan alokator dapat diperhitungkan presentasi bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

2.1.6. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi murni pertama kali dikembangkan oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh), pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2007:55).

Teori basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku yang kemudian di ekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (Arsyad 2010,367). Asumsi tersebut menjelaskan bahwa suatu daerah akan memiliki sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Maka dari itu sektor basis dapat diartikan sebagai sektor yang memiliki keunggulan atau kelebihan sehingga dapat mengekspor ke luar daerahnya. Dan

sektor non basis adalah sektor kurang mampu untuk melakukan ekspor karena hanya dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya saja. Setiap daerah harus mengetahui sektor mana yang dapat menjadi pendorong perekonomian di daerahnya agar kebijakan yang dibuat pun dapat berorientasi pada sektor basis atau unggulan yang dimiliki wilayah tersebut. Biasanya analisis basis ekonomi menggunakan variabel lapangan kerja atau pendapatan.

Dalam memilih atau menetapkan mengenai sektor basis maupun sektor non basis perlu menggunakan metode-metode yang tepat agar suatu daerah dapat mengetahui sektor mana yang menjadi ciri khas atau sektor yang berpotensi di daerahnya. Terdapat beberapa metode dalam memilih kegiatan atau sektor basis dan non basis (Tarigan,2015), diantaranya:

1. Metode langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan melakukan *survey* secara langsung kepada pelaku usaha untuk menganalisis atau menanyakan perihal kemana mereka memasarkan barang yang diproduksinya dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk memproduksi atau menghasilkan barang tersebut.

2. Metode tidak langsung

Jika melakukan metode secara langsung banyak konsekuensi yang harus dilalui seperti biaya, waktu, dan tidak semua orang dapat menjangkau tempat karena terkendala jarak. Maka dapat menggunakan metode secara tidak langsung.

3. Metode Campuran

Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan non basis. Penggunaan metode asumsi murni adalah kesalahan besar. Akan tetapi penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, maka dari itu yang sering dilakukan adalah gabungan antar metode asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran. Dalam metode campuran diadakan *survey* pendahuluan yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang termasuk basis dan non basis. Asumsinya apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka kegiatan itu langsung dianggap basis. Sebaliknya apabila 70% atau lebih produknya hanya dapat dipasarkan ditingkat lokal maka langsung dianggap non basis. Apabila posisi basis dan non basis tidak begitu kontras maka harus dilakukan *survey* seperti pengambilan *sampling* pengumpulan data langsung ke lapangan.

4. Analisis *Location Quotient*

Metode lain yang tidak langsung adalah dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama wilayah yang lebih luas. Metode ini adalah metode paling

sederhana dimana sering dijadikan metode awal untuk menjadi acuan metode lainnya.

2.1.7. Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Perroux (1970) Sebuah kutub pertumbuhan sebagai satu kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan kemuka (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan industri unggul. Dia mengatakan bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi yang memusat pada kota besar dan didukung oleh sebuah daerah belakang yang kuat. Sebuah wilayah potensial merupakan wilayah yang kurang berkembang atau tidak berkembang sama sekali tetapi memiliki faktor-faktor yang dapat menyebabkan untuk mengembangkan cepat jika ada perkembangan (Sukirno,1985).

Tarigan (2015) menyebutkan pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok atau usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun luar (wilayah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik berlokasi disitu dan masyarakat senang untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Tidak semua daerah dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri (Tarigan,2014), diantaranya:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Dimana hubungan internal sangat menentukan dinamika suatu wilayah, ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong sektor lainnya karena saling terkait.
2. Ada efek pengganda, keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung menciptakan efek pengganda;
3. Terdapat konsentrasi geografis, Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan juga meningkatkan daya tarik dari wilayah tersebut;
4. Bersifat mendorong daerah belakangnya, berarti Kabupaten/Kota wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kabupaten/Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

2.1.8. Potensi Wilayah

2.1.8.1 Sektor Unggulan

Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau

sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian (Deptan,2005). Kebijakan ekonomi dalam pengembangannya lebih diarahkan pada sektor ekonomi unggulan yang erat dengan kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan potensi masyarakat atau daerah dan sesuai dengan sumber daya ekonomi lokal.

Menurut Sambodo dalam Ghufron (2008), mengatakan sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan atau kriteria. Adapun kriteria sektor unggulan menurut Sambodo (2002) dalam (Irawaty,2019) sebagai berikut:

1. Sektor tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi.
2. Sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.
3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun ke belakang.
4. Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

2.1.8.2 Keunggulan Komparatif

Sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya terhadap industri-industri yang menjadi keunggulan komparatif secara internasional (David Ricardo). Pada intinya, hal ini menaekankan pada spesialisasi industri atau sektor ekstrim dalam sebuah negara atau daerah dalam memberdayakan industrinya yang akan menguntungkan dan berdaya saing tinggi.

Faktor-faktor yang bisa membuat suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif (Tarigan,2015), diantaranya:

1. Pemberian alam
2. Masyarakatnya menguasai teknologi (menemukan hal-hal baru)
3. Masyarakatnya menguasai keterampilan khusus
4. Wilayahnya dekat dengan pasar
5. Wilayah dengan aksesibilitas tinggi
6. Daerah konsentrasi atau sentra dari suatu kegiatan sejenis
7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan
8. Upah buruh yang tidak rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup
9. Mentalitas masyarakat yang baik seperti jujur, bekerja keras,dan disiplin
10. Kebijakan pemerintah yang mendukung

2.1.9. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan kepentingan daerah sendiri. Menurut Suparmoko (Dalam Safitri,2016) mengartikan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Perlu adanya perimbangan tugas fungsi dan peran dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah menyebabkan masing-masing daerah harus dapat memiliki penghasilan yang cukup dan sumber pembiayaan yang memadai. Daerah harus dapat mengetahui sisi unggulannya. Dengan demikian masing-masing daerah dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam mengelola pembangunan daerah.

Kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor-sektor ekonomi yang terdapat di daerahnya merupakan salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan keadaan sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut.

2.1.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara Menggunakan Analisis *Location Quotient* dan Tipologi Klassen Tahun 2015-2019. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah (Hendrianto Sundaro dan Agus	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) menggunakan data PDRB Kab/Kota dan	Menggunakan Analisis <i>Shift Share</i> , Analisis Tipologi Klassen	Ada 11 sektor perekonomian di Kota Semarang yang merupakan sektor basis (unggulan). Dari hasil LQ diperoleh informasi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sarwo Edy,2019) Sumber: https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/download/47/46	PDRB Provinsi		bahwa nilai LQ tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi dengan nilai 2,815 sedangkan nilai LQ terendah adalah sektor penyediaan, akomodasi, dan makan minum
2.	Analisis Identifikasi Sektor Perekonomian Sebagai Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Dan Sektor Potensial Di Kota Bogor Sumber: http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/24/23	Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	daerah yang diteliti	Hasil basis di kota bogor yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa lainnya, sektor pengadaan air, sektor pengelolaan sampah, sektor konstruksi, dan jasa perusahaan
3.	Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cilacap (2014), (Azis Pratomo,2014) Sumber: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/e-daj/article/view/3511	Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	Menggunakan analisis model rasio pertumbuhan (MRP), analisis <i>Overlay</i> , dan analisis Skalogram, dan menggunakan analisis Tipologi Klassen	Hasil LQ per kecamatan di Kabupaten Cilacap sektor pertanian yakni kecamatan wanareja, Cimanggu, Cipari, Bantarsari, dan Kampung Laut, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yaitu Kecamatan Nusawangu, di sektor perdagangan dan hotel yaitu Kecamatan Majenang
4.	Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data	Menggunakan analisis <i>Location</i>	Analisis model rasio pertumbuhan	Berdasarkan analisis LQ yang termasuk sektor basis adalah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010), (Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, dan Yuciana Wilandarai, 2013) Sumber: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/3667</p>	<p><i>Quotient</i> (LQ), dan analisis tipologi klassen</p>	<p>(MRP). Analisis <i>overlay</i>, dan analisis <i>shiftshare</i></p>	<p>sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih</p>
5.	<p>Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Dan Sektor Unggulan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali (I Wayan Mardianan, Made Kembar, dan I Wayan Yogi Swara, 2017) Sumber:https://ojs.unud.ac.id/index.php/ee/article/view/28115</p>	<p>Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) ,</p>	<p>Analisis Model Rasio Pertumbuhan, analisis <i>Overlay</i>, analisis <i>shifshare</i>, analisis Tipologi Klassen</p>	<p>Terdapat 8 sektor basis dari hasil analisis LQ. Sektor tersebut yaitu sekr pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor <i>real estate</i>, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya.</p>
6.	<p>Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung (Ni Komang Erawati dan I Nyoman Mahendra Yasa, 2012) Sumber: https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/3207</p>	<p>Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i> (LQ),</p>	<p>Menggunakan model rasio pertumbuhan (MRP), <i>Overlay</i>, dan Rasio Pengerjaan (RPP), dan analisis Tipologi Klassen Penduduk</p>	<p>Hasil analisis LQ sektor basis Kabupaten Klungkung yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa.</p>
7.	<p>Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kota Dumai Tahun 2014-2018 (</p>	<p>Menggunakan Analisis <i>Location Quotient</i> (</p>	<p>Menggunakan Analisis <i>Shift share</i>), dan Analisis</p>	<p>Hampir seluruh sektor ekonomi di Kota Dumai merupakan sektor</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dwi Widiarsih dan Ade Masyaresa,2020) Sumber: https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/465	LQ),	Tipologi Klassen	unggulan atau sektor basis kecuali tiga sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor <i>real esatete</i> .
8.	Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok (Juarsa Badri,2015) Sumber: https://www.researchgate.net/publication/312351471_Analisis_Potensi_dan_Pertumbuhan_Ekonomi_Daerah_Kabupaten_Solok	<i>Location Quotient</i> (LQ)	Analisis <i>Shift Share</i> , Tipologi Klassen	Hasil analisis LQ Kabupaten Solok terdapat tiga sektor yang memiliki nilai LQ lebih tinggi dari 1 (>1) atau termasuk dalam sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektok bangunan.
9.	Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2019 (Irfan Sofi) Sumber : https://anggaran.ejournal.id/akurasi/article/view/79/47	Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i>	Menggunakan analisis <i>Shift Share</i>	Hasil ekonomi yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian, pengadaan air, listrik dan gas, konstruksi, <i>Real estate</i> , perdagangan besar, administrasi pemerintahan, dan jasa jasa
10	Analisis Potensi Unggulan Dan Daya Saing Sub Sektor Pertanian Di Kabupaten Minahasa(Srikandi Pantow, Sutomo Palar, dan Patrick Wauran, 2015) Sumber: https://ejournal.unsra	Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	Menggunakan analisis <i>shift share</i>	Hasil dari perhitungan LQ sub sektor yang merupakan basis pada Kabupaten Minahasa yaitu sub sektor peternakan dan subsektor tanaman bahan makanan. Sub sektor yang menjadi basis

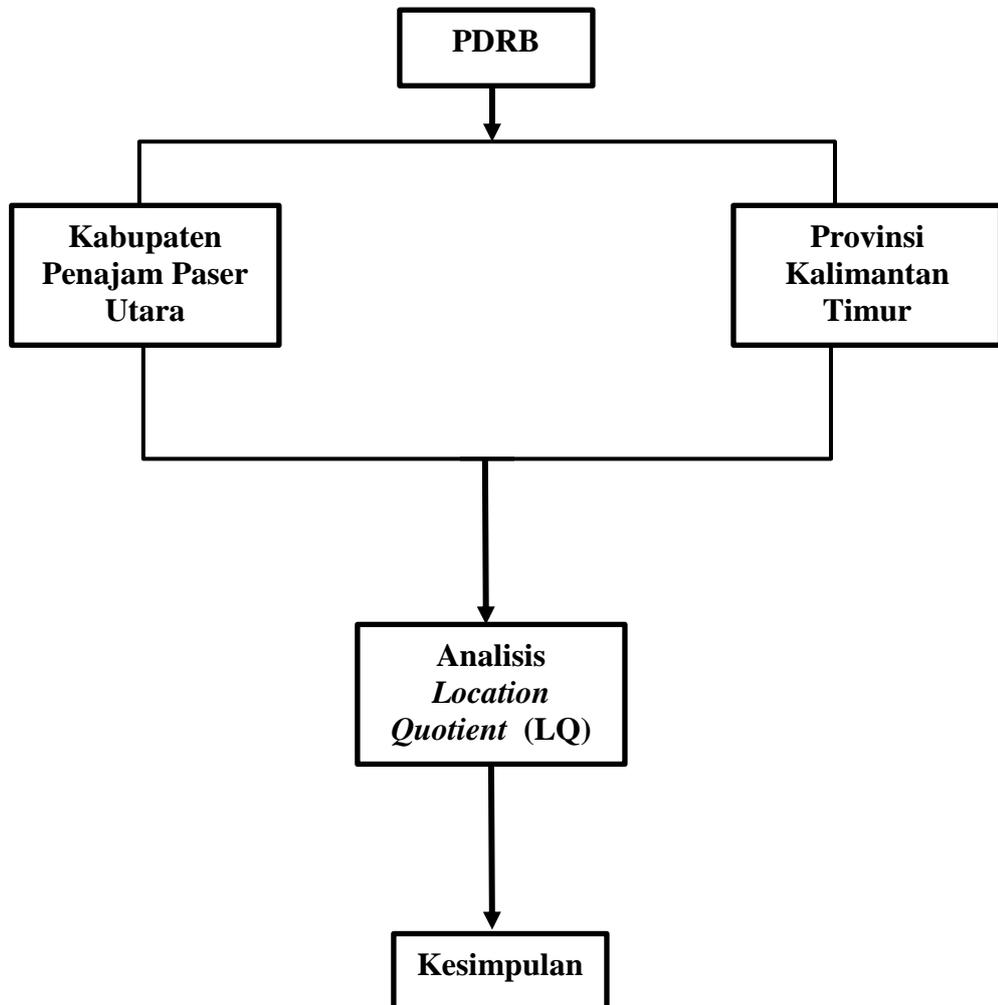
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
.	t.ac.id/index.php/jbie/article/view/9380			berarti menjadi acuan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu sub sektor tersebut dapat di ekspor ke luar daerah. Hasil analisis <i>Shift Share</i> telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara walaupun sub-sub sektor pertanian belum memiliki keunggulan yang kompetitif namun peningkatan PDRB pada sub-sub sektor pertanian ternyata mengalami kenaikan jumlah absolut yang artinya mempunyai keunggulan dalam kinerja perekonomian daerah.
11.	Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2011-2015 Sumber: https://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/jbie/article/view/17329/16871	Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i>	Menggunakan analisis tipologi kelas	Hasil analisis menunjukkan ada delapan sektor yang menjadi sektor basis yaitu sektor pertambangan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, sektor konstruksi, sektor <i>real estate</i> , sektor jasa pendidikan,

2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor basis atau unggulan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk mengetahui sektor basis yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengetahui Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2015-2019. Data tersebut kemudian diolah menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengetahui sektor basis dan non basis. Analisis ini merupakan teknik analisis sederhana yang digunakan untuk mengetahui potensi suatu daerah dan menunjukkan sektor mana yang menjadi sektor basis dan sektor non basis.

Dengan analisis yang digunakan yaitu analisis *Location Quotient* (LQ) akan didapatkan hasil mengenai sektor basis di Kabupaten Penajam Paser Utara. Yang nantinya dapat digunakan untuk analisis strategi kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara.

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, disajikan kerangka berfikir untuk menjelaskan Analisis Ekonomi Sektor Basis di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2019 pada gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Analisis Ekonomi Sektor Basis Di
Kabupaten Penajam Paser Utara**